

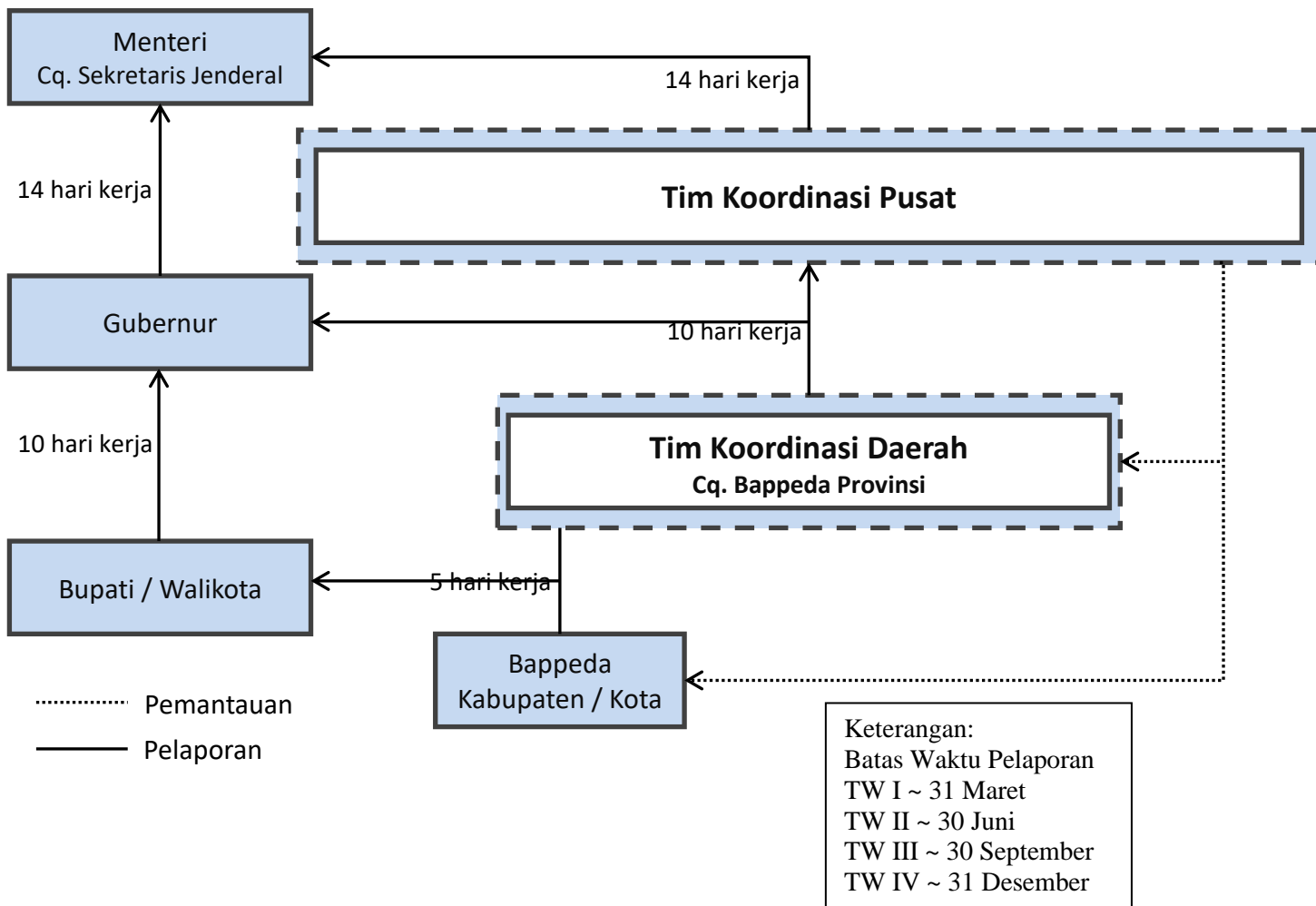
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

I. MEKANISME PELAPORAN

Mekanisme Pelaporan disampaikan berjenjang dari tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian. Pelaporan dan Pemantauan DAK *Online* melalui <http://emonitoring.pu.go.id>.

Skema Koordinasi Penyelenggaraan DAK Infrastruktur
(Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan)



II. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.1. Bidang Irigasi

Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Irigasi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan oleh OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Dalam tahap ini, pihak OPD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Irigasi dan melaporkan data progres pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi melalui laporan triwulanan I-IV secara elektronik melalui <http://emonitoring.pu.go.id>.
- 2) Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Daerah
Tim Koordinasi Daerah terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Teknis Provinsi terkait, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS). Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja pelaksanaan DAK Bidang Irigasi pada OPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. identifikasi permasalahan dan tindak lanjut perbaikan; dan
 - c. percepatan dan solusi permasalahan.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Pusat
 - a. tahap monitoring dan evaluasi melalui kunjungan lapangan
Disamping melaksanakan pemantauan DAK secara online melalui <http://emonitoring.pu.go.id>., pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Irigasi oleh Tim Koordinasi Pusat dilakukan melalui kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan DAK Bidang Irigasi. Format isian pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK Bidang Irigasi, yaitu:
 - 1) Format isian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi mengacu pada Form IR.1
 - 2) Dokumen kelengkapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi yang perlu dilengkapi oleh Pemda penerima DAK Bidang Irigasi mengacu pada Form IR.2
 - 3) Format isian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir mengacu pada Form IR.3
 - 4) Dokumen kelengkapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Menu Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir yang perlu dilengkapi oleh Pemda penerima DAK Bidang Irigasi mengacu pada Form IR.4.
 - b. tahap evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Irigasi
Tim Koordinasi Pusat melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Irigasi melalui forum koordinasi yang melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BBWS/BWS dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk mendapatkan informasi lebih rinci terkait dengan rencana pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan inventarisasi permasalahan serta tindak lanjut perbaikan pelaksanaan DAK Bidang Irigasi.

FORM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BIDANG IRIGASI
MENU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI DAERAH IRIGASI

DI KAB/KOTA : _____ PROV : _____

A. UMUM

1. Nama D.I : DI/DIR/DIT/DIAT/DIP _____ (Coret yang tidak perlu)
2. Luas D.I : _____ Ha
3. Tahun Awal Dibangun : _____
4. Sumber air : Sungai/mata air/bendungan/embung/dll
(Coret yang tidak perlu)
5. Jenis Irigasi : Teknis/semi Teknis/Sederhana (Coret yang tidak perlu)

6. Rincian Aset Daerah irigasi :

- | | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------|
| • Bendung | : _____ buah | • Pompa | : _____ buah |
| • Free Intake | : _____ buah | • Talang | : _____ buah |
| • Sal. Primer | : _____ m | • Tanggul Pelindung | : _____ m |
| • Sal. Sekunder | : _____ m | • Jalan Inpeksi | : _____ km |
| • Sal. Tersier | : _____ m | • Kantor | : _____ buah |
| • Sadap | : _____ buah | • Rumah Jaga | : _____ buah |
| • Bagi | : _____ buah | • ... | |
| • Bagi sadap | : _____ buah | • ... | |
| • Gorong-gorong | : _____ buah | • ... | |
| • Sipun | : _____ buah | • ... | |
| • Pintu air | : _____ buah | • ... | |
| • Jembatan | : _____ buah | | |

7. Riwayat Penanganan (5 Tahun Terakhir) :

Tahun	Penanganan (PB/PK/R/OP)	Output pekerjaan*	Volume		Nilai pagu (Rp)	Sumber Dana (DAK/APBD)
			Jumlah	Satuan (m/bh)		

Keterangan :

PB : Pembangunan Baru R : Rehabilitasi

PK : Peningkatan OP : Operasi dan Pemeliharaan

* output pekerjaan di isi : sal. primer/ sal. sekunder/bendung/pintu/sadap/ Dll

8. Kelompok Tani

- P3A : _____ Kelompok
- IP3A : _____ Kelompok
- GP3A : _____ Kelompok
- Komisi Irigasi : ada / tidak ada (Coret yang tidak Perlu)

9. Operasi dan Pemeliharaan :

Petugas OP	Jumlah Ketersediaan (orang)	Jumlah Kebutuhan (orang)
Pengamat		
Juru/Mantri		
Petugas Operasi bendung (POB)		
Petugas Pintu Air (PPA)		

10. Produktifitas Tanam

Padi :

- Luas Tanam : _____ Ha
- IP : _____ %

Palawija :

- Luas Tanam : _____ Ha
- IP : _____ %

11. Kondisi D.I sekarang : tuntas (tidak perlu pengusulan lagi)/belum tuntas untuk keseluruhan D.I (*Coret yang tidak perlu*)

Jika belum tuntas : Rencana tuntas tahun : _____
pekerjaan yang belum selesai : _____

B. KHUSUS

1. Nama Paket : _____
2. Menu Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi (*coret yang tidak perlu*)
3. Penyedia Jasa : _____
4. No. Kontrak : _____
5. Waktu pengerjaan : _____
6. Output : _____
7. Outcome : _____ Ha
8. Progres Fisik : _____ %
9. Progres Keuangan : _____ %

C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan :

_____.

2. Tindak Lanjut :

_____.

3. Rekomendasi :

_____.

4. Peran Balai/Provinsi dalam Pemantauan dan Evaluasi DAK :

_____.

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto dokumentasi pekerjaan.
2. Video/Drone (jika ada).
3. Skema Jaringan.

DOKUMEN KELENGKAPAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK
BIDANG IRIGASI
MENU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI DAERAH IRIGASI

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Nama Daerah Irigasi :

No.	Kelengkapan Dokumen	Ceklist (√)
1	Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)	
2	Dokumen Kontrak	
3	Kurva S	
4	Kerangka Acuan Kerja	
5	Gambar As Built Drawing	
6	Skema Jaringan Irigasi	
7	Skema Bangunan	
8	Tabel pendanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP)	
9	Provisional Hand Over (PHO)	
10	Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output	
11	Rencana Kegiatan DAK	
12	SK Komisi Irigasi	

MENU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI
BANJIR

DI KAB/KOTA : _____ PROV : _____

A. UMUM

1. Nama Wilayah Sungai : _____
2. DAS : _____
3. Sungai : _____
4. Menu Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan (coret yang tidak perlu)
5. Riwayat Penanganan (5 tahun terakhir) :

Tahun	Penanganan (PB/PK/R/OP)	Output pekerjaan*	Volume		Nilai pagu (Rp)	Sumber Dana (DAK/APBD)
			Jumlah	Satuan (m/bh)		

Keterangan :

PB : Pembangunan Baru R : Rehabilitasi

PK : Peningkatan OP : Operasi dan Pemeliharaan

* output pekerjaan di isi : bangunan tanggul/ bangunan pelindung/penguat tebing/kolam retensi.. dst.

6. Data Kerusakan dan Kerugian akibat banjir 3 Tahun Terakhir :

No	Tahun	Area Terdampak	Kerugian akibat banjir					
			Luas Genangan		Tinggi Genangan		Lama Genangan	
1		Pertanian		Ha		cm		jam
		Permukiman		Ha		cm		jam
		Jalan (Nas/Prov/Kab/Kota)		Km		cm		jam
		dst.						
2		Pertanian		Ha		cm		jam
		Permukiman		Ha		cm		jam
		Jalan (Nas/Prov/Kab/Kota)		Km		cm		jam
		dst.						
3		Pertanian		Ha		cm		jam
		Permukiman		Ha		cm		jam
		Jalan (Nas/Prov/Kab/Kota)		Km		cm		jam
		dst.						

B. KHUSUS

1. Nama Paket : _____
2. Penyedia Jasa : _____
3. No. Kontrak : _____
4. Waktu pengerjaan : _____
5. Output Pekerjaan :

No	Jenis Infrastruktur	Output Kegiatan		
		komponen	nilai	Satuan
1	Bangunan Tanggul	Panjang		m
		Tinggi		m
2	Bangunan Perlindungan dan Penguatan Tebing	Panjang		m
		Tinggi		m
3	Kolam Retensi	Jumlah		bh
4	Dst.			

C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan :

_____.

2. Tindak Lanjut :

_____.

3. Rekomendasi :

_____.

4. Peran Balai/Provinsi dalam Pemantauan dan Evaluasi DAK :

_____.

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto dokumentasi pekerjaan.
2. Video/Drone (jika ada).
3. DED

DOKUMEN KELENGKAPAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK
BIDANG IRIGASI
MENU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Nama Wilayah Sungai :
DAS :
Sungai :
Nama Daerah Irigasi :

No.	Kelengkapan Dokumen	Ceklist (√)
1	Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)	
2	Dokumen Kontrak	
3	Kurva S	
4	Kerangka Acuan Kerja	
5	Survey Investigasi Desain (SID)	
6	Detail Engineering Design (DED)	
7	Data Kerusakan BPBD	
8	Provisional Hand Over (PHO)	
9	Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output	
10	Rencana Kegiatan DAK	

2.2. Bidang Jalan

Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK pada tahun berikutnya, serta program pembinaan penyelenggaraan DAK.

Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi:

- 1) Pemantauan oleh OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Dalam tahap ini, pihak OPD Provinsi/Kabupaten/Kota mempersiapkan laporan triwulanan I-IV melaporkan secara elektronik melalui *e-Monitoring* DAK setiap ada perubahan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan DAK bidang jalan.
Laporan triwulanan untuk OPD Provinsi disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah dengan tembusan Satker P2JN.
- 2) Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Daerah
Tim Koordinasi Daerah terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Teknis Provinsi terkait, dan Balai/Satker P2JN. Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja OPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. identifikasi permasalahan dan tindak perbaikan; dan
 - c. percepatan dan solusi permasalahan.
- 3) Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Pusat c.q Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID).
 - a. tahap pemantauan dan inventarisasi permasalahan
Tim PFID menginventarisasi permasalahan pelaksanaan DAK bidang jalan berdasarkan laporan triwulan dan atau berdasarkan informasi dari tim koordinasi daerah (Satker P2JN). Tim PFID melakukan evaluasi permasalahan pelaksanaan DAK bidang jalan setiap daerah. PFID melakukan konfirmasi dan verifikasi permasalahan pelaksanaan DAK bidang jalan kepada Satker P2JN dan daerah.
 - b. tahap monitoring dan evaluasi melalui kunjungan lapangan
Pertimbangan dan kriteria pemilihan lokasi kegiatan monitoring evaluasi dan kunjungan lapangan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu:
 1. kemajuan pelaksanaan pekerjaan
 2. tingkat kepatuhan terhadap Laporan Triwulan.
- 4) Tahap Laporan Tahunan DAK
berdasarkan laporan triwulan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil laporan kegiatan monitoring evaluasi dan kunjungan lapangan, membuat laporan tahunan DAK bidang jalan. berdasarkan laporan tahunan DAK bidang jalan ini kemudian PFID membuat rekomendasi penyelenggaraan DAK bidang jalan TA n+1. Laporan paling lambat setelah 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
- 5) Tahap Finalisasi
Pada tahap ini PFID bertugas merekomendasikan penyelenggaraan DAK bidang jalan TA n+1 berdasarkan laporan tahunan DAK yang disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan disampaikan juga kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas.

2.3. Bidang Air Minum dan Sanitasi

Peran Tim Koordinasi dalam Tahapan Pemantauan Evaluasi Pelaporan:

- 1) Tim Koordinasi Pusat (Pusat FID, Direktorat PSPAM, Direktorat PPLP)
 - a) melakukan pemantauan pelaksanaan DAK bidang air minum, sanitasi melalui sistem e-monitoring DAK dan koordinasi ke daerah.
 - b) melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pencapaian progress fisik dan keuangan DAK bidang air minum, sanitasi di daerah.
 - c) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada daerah yang mendapatkan DAK.
 - d) melaksanakan rapat kerja DAK untuk mengoptimalkan penyelenggaraan DAK.
- 2) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi:
 - a) melaksanakan pemantauan dalam tahap konstruksi.
 - b) memastikan pekerjaan berlangsung sesuai dengan jadwal kerja yang telah disusun.
 - c) memantau kualitas pekerjaan dari infrastruktur air minum, sanitasi yang sedang dibangun.
 - d) memantau realisasi pendanaan penggunaan DAK bidang air minum dan sanitasi untuk pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
 - b) melakukan pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur DAK bidang air minum dan sanitasi
 - c) melaporkan progress kegiatan dan keuangan kepada Pemerintah Pusat.

Pemantauan pelaksanaan kegiatan DAK adalah pengumpulan informasi pelaksanaan kegiatan DAK secara rutin untuk mengukur progres pelaksanaan kegiatan DAK, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan, serta memastikan realisasi pelaksanaan kegiatan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis dan Rencana Kegiatan (RK) DAK.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK adalah penilaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK dengan RK DAK. Pemantauan pelaksanaan kegiatan DAK oleh OPD Teknis penanggung jawab DAK di kabupaten/kota penerima DAK mengacu pada tabel 3.1 dan dilaporkan melalui aplikasi pelaporan minimal 3 kali pada setiap tahapan penyaluran dalam satu tahun anggaran untuk kemudian dievaluasi oleh Kementerian.

Tabel 3.1 Kesesuaian Realisasi *Output* dengan RK

No	Bidang	Menu	Lokasi	Komponen <i>Output</i>	Volume <i>Output</i>		Satuan <i>Output</i>	Persentase Realisasi <i>Output</i>	Hambatan Pencapaian Target
					Target	Realisasi			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
dst									

Keterangan:

Kolom 1 : Nama bidang DAK

Kolom 2 : Menu kegiatan DAK pada RK DAK

Kolom 3 : Nama desa/kelurahan dan kecamatan tempat pelaksanaan kegiatan DAK pada RK DAK

Kolom 4 : Target komponen *output* kegiatan pada RK DAK (Broncaptering, Tangki Septik, Rumah, dll)

Kolom 5 : Target volume *output* kegiatan pada RK DAK

Kolom 6 : Realisasi volume *output* kegiatan

Kolom 7 : Satuan *output* kegiatan pada RK DAK (L/detik, m³, m, unit, dll)

Kolom 8 : Persentase realisasi *output* kegiatan yang telah dilaksanakan (kolom 6 dibagi kolom 5)

Kolom 9 : Hambatan pencapaian target *output*

Tabel 3.2 Kesesuaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dengan RK

No	Bidang	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan											Keterangan
		Pelaksanaan Kegiatan				Progres		Dokumen					
		Menu	Lokasi	Geotagging	Cara Pengadaan	Metode Penyaluran	Progres Keuangan (%)	Progres Fisik (%)	DPA	Dokumen Kontrak / KAK Swakelola	Dokumen PHO	Dokumentasi Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
dst													

Keterangan:

Kolom 1 : Nama bidang DAK

Kolom 2 : Menu kegiatan DAK yang dilaksanakan

Kolom 3 : Nama desa/kelurahan dan kecamatan tempat realisasi pelaksanaan kegiatan DAK

Kolom 4 : Koordinat geografi tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

Kolom 5 : Cara pengadaan kegiatan yang dilaksanakan (kontraktual atau swakelola)

Kolom 6 : Metode penyaluran DAK (sekaligus, bertahap, atau campuran)

Kolom 7 : Persentase realisasi keuangan yang telah dibelanjakan dari pagu DAK

Kolom 8 : Persentase realisasi fisik

Kolom 9 : Unggahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mencantumkan kegiatan DAK yang dilaksanakan

Kolom 10 : Unggahan Dokumen Kontrak/Swakelola kegiatan DAK yang dilaksanakan

Kolom 11 : Unggahan Dokumen Provisional Hand Over (PHO) kegiatan DAK yang dilaksanakan

Kolom 12 : Unggahan Dokumentasi Pelaksanaan 0%-50%-100%

Kolom 13 : Penjelasan hal-hal spesifik yang perlu disampaikan

2.4. Bidang Perumahan

2.4.1. Rumah Swadaya

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari pelaksana tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Hasil pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar penilaian kinerja dan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya pada tahun mendatang. Tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pemantauan oleh OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kab/Kota, meliputi:
 - a) OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota melaporkan progres keuangan dan fisik secara rutin mingguan melalui aplikasi e-monitoring DAK,
 - b) OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota menyiapkan laporan triwulan I-IV dan dicetak melalui aplikasi e-monitoring DAK.
 - c) Laporan triwulan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada OPD Bidang Perumahan Tingkat Provinsi, SNVT Penyediaan Perumahan Tingkat Provinsi dan Ditjen Perumahan c.q Direktorat Rumah Swadaya,
 - d) OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan progres pelaksanaan kegiatan secara rutin mingguan melalui aplikasi SIMDAK,
 - e) OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen pendukung kepada OPD Bidang Perumahan Tingkat Provinsi, SNVT Penyediaan Perumahan Tingkat Provinsi dan Ditjen Perumahan c.q Direktorat Rumah Swadaya. Dokumen pendukung yang dimaksud meliputi:
 - (1) DPA Fisik dan DPA Penunjang
 - (2) Rencana Kegiatan
 - (3) SK Rencana Kegiatan yang disahkan oleh Bupati/Walikota
 - (4) SK PPK DAK Subbidang Rumah Swadaya
 - (5) SK Tim Teknis Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota
 - (6) SK Tenaga Fasilitator Lapangan
 - (7) SK Penerima Bantuan yang disahkan oleh Bupati/Walikota
 - f) OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Finalisasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Rumah Swadaya, dengan substansi laporan meliputi:
 - (1) Rencana anggaran dan alokasi unit berdasarkan Rencana Kegiatan,
 - (2) Realisasi pemanfaatan anggaran,
 - (3) Realisasi jumlah unit rumah terbangun,
 - (4) Permasalahan dan strategi percepatan,
 - (5) Dokumentasi pelaksanaan.

Format Laporan Finalisasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Rumah Swadaya sebagaimana terlampir pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

- 2) Pemantauan oleh Tim Koordinasi Daerah
Tim Koordinasi Daerah terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, OPD Bidang Perumahan Tingkat Provinsi dan SNVT Penyediaan Perumahan Tingkat Provinsi. Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Kinerja OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota,
 - b) Identifikasi permasalahan dan tindak perbaikan,
 - c) Solusi dan strategi percepatan.

- 3) Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Koordinasi Pusat c.q. Ditjen Perumahan
Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat meliputi:
 - a) Pemantauan progres pelaksanaan DAK Subbidang Rumah Swadaya secara rutin melalui aplikasi e-Monitoring DAK dan SIMDAK,
 - b) Inventarisasi permasalahan berdasarkan laporan triwulan dan/atau informasi dari tim koordinasi daerah dan OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya Tingkat Kabupaten/Kota,
 - c) Pemantauan dan evaluasi melalui kunjungan lapangan dengan pertimbangan kriteria pemilihan lokasi meliputi:
 - (1) Progres pelaksanaan DAK Subbidang Rumah Swadaya
 - (2) Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan

- 4) Laporan Tahunan Penyelenggaraan DAK Subbidang Rumah Swadaya
Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara berjenjang, Tim Koordinasi Pusat menyusun laporan tahunan penyelenggaraan DAK Subbidang Rumah Swadaya sebagai masukan penyelenggaraan DAK Subbidang Rumah Swadaya TA n+1.

Tabel 1 – Format Laporan Penyelenggaraan DAK Subbidang Rumah Swadaya TA 2020
LAPORAN PENYELENGGARAAN DAK SUBBIDANG RUMAH SWADAYA TA 2020

Provinsi :
 Kab/Kota :

Subbidang Rumah Swadaya [05]
 Realisasi Kegiatan s/d tanggal

No	Nama Paket Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan					Realisasi Kegiatan							
		Volume (unit)	Jumlah Penerima Bantuan (KK)	Anggaran			Volume (unit)	Jumlah Penerima Bantuan (KK)	Anggaran			Progres Fisik (%)	Progres Keuangan (%)	Jumlah Unit Terbangun 100%
				Fisik (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)			Fisik (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>1</u>	<u>Pembangunan Baru</u>													
	1.													
	2.													
	3. dst													
<u>2</u>	<u>Peningkatan Kualitas</u>													
	1.													
	2.													
	3. dst													
<u>3</u>	<u>Biaya Penunjang</u>													
	TOTAL													

.....2020

Kepala OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya
 Kab/Kota

(.....)

NIP.

Tabel 2 – Format Permasalahan dan Strategi Tindak Lanjut

**PERMASALAHAN DAN STRATEGI TINDAK LANJUT
PENYELENGGARAAN DAK SUBBIDANG RUMAH SWADAYA TA 2020**

Provinsi :

Kab/Kota :

No	Nama Paket Pekerjaan dan Lokasi	Permasalahan/Kendala di Lapangan	Strategi Tindak Lanjut
1	2	3	4
<u>1</u>	Pembangunan Baru		
	1.		
	2.		
	3. dst		
<u>2</u>	Peningkatan Kualitas		
	1.		
	2.		
	3. dst		
<u>3</u>	Biaya Penunjang		

.....2020

Kepala OPD Pelaksana DAK Subbidang Rumah Swadaya
Kab/Kota

(.....)

NIP.

Tabel 3 – Dokumentasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Rumah Swadaya

DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KEGIATAN DAK SUBBID RUMAH SWADAYA TA 2020

Catatan:

* Foto 0 %, 30%, dan 100% (Setiap Kabupaten 10 Penerima Bantuan)

Provinsi :	Nomor BNBA :	
Kabupaten :	Nama :	
Kecamatan :	Besar Dana BRS :	
Desa :	Keswadayaan :	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%

Provinsi :	Nomor BNBA :	
Kabupaten :	Nama :	
Kecamatan :	Besar Dana BRS :	
Desa :	Keswadayaan :	
Kondisi 0%	Kondisi 30%	Kondisi 100%

2.4.2. Rumah Khusus

- 1) Pemantauan DAK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan DAK di daerah telah sesuai dengan:
 - a) Program prioritas nasional;
 - b) Daftar calon penghuni berdasarkan SK Penetapan calon Penghuni;
 - c) Surat pernyataan Kabupaten/Kota di dalam proposal dengan pelaksanaan;
 - d) Gambar, spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya dengan Pelaksanaan di lapangan.

Pemantauan DAK mengacu pada format pemantauan kesesuaian program.

2) Evaluasi Pemanfaatan DAK

Evaluasi Pemanfaatan DAK bertujuan agar terjadi kesesuaian antara masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), dan kemanfaatan (benefit) kegiatan yang dibiayai DAK. Evaluasi harus memperhatikan kriteria dan indikator. Hasil evaluasi Pemerintah Pusat digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di daerah (paling lambat 31 hari kalender setelah TA berakhir). Hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah disampaikan ke Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

3) Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja Pelaksanaan DAK bertujuan untuk mengukur hasil kerja pelaksanaan DAK dan selanjutnya dapat diusulkan untuk pengalokasian DAK pada tahun berikutnya. Dengan penilaian:

- a) Tepat sasaran;
- b) Tepat mutu;
- c) Tepat waktu;
- d) Memiliki dampak dan manfaat.

4) Pelaporan

Mekanisme pelaporan disampaikan secara berjenjang dari tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Kementerian. Pelaporan dan pemantauan DAK online melalui emonitoring.pu.go.id > dak.

Format Pemantauan Kesesuaian Program

PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAM

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi (Titik koordinat)	Kesesuaian Output	Kesesuaian Outcome (Calon Penerima Manfaat)	Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan Program (Rumah Khusus)	Kesesuaian DPA dengan Pelaksanaan pembangunan	Permasalahan	Rekomendasi /tindaklanjut	Kepatuhan dalam Pelaporan (Tahap I,II,III)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada paket sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan (RK)

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi nama paket/nama pekerjaan yang ditangani
- 3 = diisi nama Kecamatan, kelurahan/desa lokasi proyek, dan titik koordinat
- 4 = diisi kesesuaian Output
- 5 = diisi kesesuaian Outcome
- 6 = diisi kesesuaian Rencana Kerja dengan Program
- 7 = diisi Kesesuaian DPA dengan pelaksanaan pembangunan
- 8 = Permasalahan
- 9 = Rekomendasi/Tindak Lanjut
- 10 = Kepatuhan dalam Pelaporan

III. MATERI PELAPORAN

Materi laporan yang disampaikan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota:

a. Data Umum dan Data Dasar

1. Data Umum Provinsi (PDU-1) dan Data Umum Kabupaten/Kota (KDU-1) merupakan data dasar yang dilaporkan sekali yaitu pada Triwulan I.
2. Data Sumber Pendanaan Provinsi (PDU-2) dan Data Sumber Pendanaan Kabupaten/Kota (KDU-1) merupakan data sumber pendanaan yang dilaporkan sekali yaitu pada Triwulan I.
3. Data Dasar (Form DD) dilaporkan sekali yaitu pada Triwulan I.
4. Data Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Minum Kabupaten/Kota (SPM-AM) merupakan data capaian SPM Urusan PU Kabupaten/Kota yang dilaporkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Dokumen LKPJ (Triwulan I)
5. Data Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Limbah/Sanitasi Kabupaten/Kota (SPM-AL) merupakan data capaian SPM Bidang PU Subbidang Air Limbah Kabupaten/Kota yang dilaporkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Triwulan I)
6. Data Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Kabupaten/Kota (SPM-PR1 & 2) merupakan data capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota yang dilaporkan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Triwulan I)

b. Data Pelaksanaan Kegiatan

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan setiap triwulan, terdiri dari kesesuaian program, proses dan pelaksanaan kegiatan, dan peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%).

Form Data Umum Provinsi

Provinsi :
Tahun :

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (m ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kontur Tanah	Potensi
1	2	3	4	5	6
Total					

Catatan: Diisi hanya sekali saja, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. urutan
- 2 = diisi nama kabupaten/kota
- 3 = diisi luas kabupaten/kota
- 4 = diisi jumlah penduduk kabupaten/kota
- 5 = diisi kontour tanah yang dominan di kabupaten/kota (pantai, pegunungan, dataran)
- 6 = diisi potensi daerah kabupaten/kota (perkebunan, pertanian, pertambangan)

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan					
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Pusat (Sektor) (Rp)	Pinjaman (Rp)	Hibah (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bidang Jalan dan Jembatan						
a	Pemeliharaan Rutin Jalan						
b	Pemeliharaan Berkala Jalan						
c	Peningkatan Jalan						
d	Pembangunan Jalan						
e	Pemeliharaan Rutin Jembatan						
f	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan						
g	Penggantian Jembatan						
h	Pembangunan Jembatan						
	Sub Total						
2	Bidang Irigasi						
a	Pembangunan jaringan irigasi						
b	Peningkatan jaringan irigasi						
c	Rehabilitasi jaringan irigasi						
	Sub Total						
3	Bidang Air Minum						
a	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun						
b	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan						
c	Penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana terbangun						
	Sub Total						
4	Bidang Sanitasi						
a	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
b	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)						
c	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah						
d	Pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan						
	Sub Total						

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan					
		APBD	DAK	Pusat (Sektor)	Pinjaman	Hibah	Total
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Bidang Perumahan						
a	Pembangunan baru rumah						
b	Peningkatan kualitas rumah						
c	Pembangunan rumah khusus						
	Sub Total						
	Total Dana						

Catatan:

Data diisi secara lengkap sekali saja (Triwulan I), kecuali ada perubahan

1 = diisi nomor urut

2 = diisi nama program penanganan tiap bidang

3 = diisi alokasi APBD untuk tiap bidang

4 = diisi alokasi DAK untuk tiap bidang

5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap bidang

6 = diisi alokasi yang berasal dari pinjaman untuk tiap bidang

7 = diisi alokasi yang berasal dari hibah untuk tiap bidang

8 = diisi alokasi total untuk tiap bidang

Form Data Umum Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Tahun :

No	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (m ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kontur Tanah	Potensi
1	2	3	4	5	6
Total					

Catatan: Diisi hanya sekali saja, kecuali ada perubahan

Keterangan:

1 = No. urut

2 = diisi nama kecamatan

3 = diisi luas wilayah kecamatan

4 = diisi jumlah penduduk kecamatan

5 = diisi kontour tanah yang dominan di kecamatan (pantai, pegunungan, dataran)

6 = diisi potensi daerah kecamatan (perkebunan, pertanian, pertambangan)

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan					
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Pusat (Sektor) (Rp)	Pinjaman (Rp)	Hibah (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bidang Jalan dan Jembatan						
a	Pemeliharaan Rutin Jalan						
b	Pemeliharaan Berkala Jalan						
c	Peningkatan Jalan						
d	Pembangunan Jalan						
e	Pemeliharaan Rutin Jembatan						
f	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan						
g	Penggantian Jembatan						
h	Pembangunan Jembatan						
	Sub Total						
2	Bidang Irigasi						
a	Pembangunan jaringan irigasi						
b	Peningkatan jaringan irigasi						
c	Rehabilitasi jaringan irigasi						
	Sub Total						
3	Bidang Air Minum						
a	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun						
b	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan						
c	Penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana terbangun						
	Sub Total						
4	Bidang Sanitasi						
a	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
b	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)						
c	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah						
d	Pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan						
	Sub Total						

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan					Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Pusat (Sektor) (Rp)	Pinjaman (Rp)	Hibah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Bidang Perumahan						
a	Pembangunan baru rumah						
b	Peningkatan kualitas rumah						
c	Pembangunan rumah khusus						
	Sub Total						
	Total Dana						

Catatan:

Data diisi secara lengkap sekali saja (Triwulan I), kecuali ada perubahan

1 = diisi nomor urut

2 = diisi nama program penanganan tiap bidang

3 = diisi alokasi APBD untuk tiap bidang

4 = diisi alokasi DAK untuk tiap bidang

5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap bidang

6 = diisi alokasi yang berasal dari pinjaman untuk tiap bidang

7 = diisi alokasi yang berasal dari hibah untuk tiap bidang

8 = diisi alokasi total untuk tiap bidang

Data Dasar Prasarana Irigasi Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Tahun :

No	No. Daerah Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)			Indeks Pertanaman (%)	Produksi (Ton/Ha)	Saluran (m)			Kondisi				Jumlah Bangunan (unit)		Keterangan
			Daerah Irigasi	Areal Tanam	Rencana Panen			Primer	Sekunder	Tersier	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Sadap / Bagi	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10				11	12	13

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada Triwulan I

Keterangan:

- 1 = diisi nomor urut
- 2 = diisi kode daerah irigasi (DI)
- 3 = diisi nama daerah irigasi
- 4 = diisi luas daerah irigasi (dalam Ha)
- 5 = diisi luas areal tanam (dalam Ha)
- 6 = diisi luas rencana panen (dalam Ha)
- 7 = diisi indeks pertanaman (IP) (dalam %)
- 8 = diisi data produksi padi (dalam Ton/Ha)
- 9 = diisi panjang dan jumlah jaringan dalam DI
- 10 = diisi kondisi umum DI
- 11 = diisi jumlah bangunan sadap/bagi (dalam unit)
- 12 = diisi jumlah bangunan pelengkap lainnya, contoh: pintu air dan perlengkapannya, bangunan terjun, pelimpah
- 13 = diisi informasi yang perlu ditambahkan

Data Dasar Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Kecamatan :
Tahun :

No	No. Air Minum	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Air Minum (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
- 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
- 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
- 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
- 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)

Data Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Sub Bidang Air Minum Kabupaten/Kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH	KONDISI TAHUN N-1				TARGET TAHUN N				TARGET TAHUN N+1				
				JUMLAH RUMAH (UNIT)		PERSENTASE (%)		JUMLAH RUMAH (UNIT)		PERSENTASE (%)		JUMLAH RUMAH (UNIT)		PERSENTASE (%)		
				SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Kecamatan A	Kelurahan A1														
		Kelurahan A2														
2	Kecamatan B	Kelurahan B1														
		Kelurahan B2														
		Kelurahan B3														
TOTAL																

....., 2020
Kepala Dinas

.....
NIP.

Data Dasar Prasarana Sanitasi Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Kecamatan :
Tahun :

No	No. Sanitasi	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Sanitasi (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
- 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
- 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
- 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
- 6 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

Data Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Sub Bidang Air Limbah Kabupaten/Kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH	KONDISI TAHUN N-1								
				JUMLAH RUMAH (UNIT)					PERSENTASE (%)			
				SPALD-S AKSES DASAR	SPALD-S AKSES AMAN			SPALD-T AKSES AMAN	AKSES DASAR	AKSES AMAN	SUDAH TERLAYANI	
					CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL					MCK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kecamatan A	Kelurahan A1										
		Kelurahan A2										
2	Kecamatan B	Kelurahan B1										
		Kelurahan B2										
TOTAL												

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH	TARGET TAHUN N								
				JUMLAH RUMAH (UNIT)					PERSENTASE (%)			
				SPALD-S AKSES DASAR	SPALD-S AKSES AMAN			SPALD-T AKSES AMAN	AKSES DASAR	AKSES AMAN	SUDAH TERLAYANI	
					CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL					MCK
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Kecamatan A	Kelurahan A1										
		Kelurahan A2										
2	Kecamatan B	Kelurahan B1										
		Kelurahan B2										
TOTAL												

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH	TARGET TAHUN N+1							
				JUMLAH RUMAH (UNIT)					PERSENTASE (%)		

1	2	3	4	SPALD-S AKSES DASAR	SPALD-S AKSES AMAN			SPALD-T AKSES AMAN	AKSES DASAR	AKSES AMAN	SUDAH TERLAYANI
				CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	IPALD PERMUKIMAN/ KAWASAN KHUSUS/ PERMUKIMAN			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kecamatan A	Kelurahan A1									
		Kelurahan A2									
2	Kecamatan B	Kelurahan B1									
		Kelurahan B2									
TOTAL											

....., 2020
Kepala Dinas

.....
NIP.

Data Dasar Perumahan Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No.	No. Perumahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Keluarga (KK)	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Jml. RTLH (Unit)	Jml. Backlog (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 = Nomor Urut
- 2 = Diisi Kode Perumahan
- 3 = Diisi nama kecamatan/distrik yang bersangkutan
- 4 = Diisi nama desa/Kelurahan/Kampung yang bersangkutan
- 5 = Diisi Jumlah Rumah di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
- 6 = Diisi Jumlah Keluarga di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
- 7 = Diisi Jumlah Penduduk di Desa/Kelurahan yang bersangkutan
- 8 = Diisi Jumlah Penduduk Miskin di Desa/Kelurahan yang bersangkutan

Data Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten/Kota

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH (UNIT)			KONDISI TAHUN N-1				TARGET TAHUN N				TARGET TAHUN N+1			
						JUMLAH RUMAH SUDAH TERLAYANI (UNIT)			PERSENTASE (%)	JUMLAH RUMAH SUDAH TERLAYANI (UNIT)			PERSENTASE (%)	JUMLAH RUMAH SUDAH TERLAYANI (UNIT)			PERSENTASE (%)
			RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	SUDAH TERLAYANI	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	SUDAH TERLAYANI	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	SUDAH TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kecamatan A	Kelurahan A1															
		Kelurahan A2															
2	Kecamatan B	Kelurahan B1															
		Kelurahan B2															
TOTAL																	

....., 2020
Kepala Dinas

.....
NIP.

Data Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH (UNIT)	KONDISI TAHUN N-1		TARGET TAHUN N		TARGET TAHUN N+1	
				JUMLAH RUMAH SUDAH TERLAYANI (UNIT)	PERSENTASE (%)	JUMLAH RUMAH SUDAH TERLAYANI (UNIT)	PERSENTASE (%)	JUMLAH RUMAH SUDAH TERLAYANI (UNIT)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kecamatan A	Kelurahan A1							
		Kelurahan A2							
2	Kecamatan B	Kelurahan B1							
		Kelurahan B2							
TOTAL									

....., 2020
Kepala Dinas

.....
NIP.

IV. MATERI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

4.1. Pemantauan Pelaksanaan DAK

Pemantauan Pelaksanaan DAK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan.

Pemantauan progress kegiatan DAK untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengacu pada Form P-0 dan Form P-1.

4.2. Evaluasi Pemanfaatan DAK

Evaluasi pemanfaatan DAK bertujuan agar terjadi kesesuaian antara masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan kemanfaatan (*benefit*) kegiatan yang dibiayai DAK.

Evaluasi pemanfaatan DAK untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengacu pada Form P-2, dengan memperhatikan kriteria dan indikator yang tertuang dalam Tabel 4.1.

4.3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pelaksanaan DAK bertujuan untuk mengukur hasil kerja pelaksanaan DAK dan selanjutnya dapat diusulkan untuk pengalokasian DAK pada tahun berikutnya.

Penilaian kinerja pelaksanaan DAK mengacu pada Form PEV-1 dan Form PEV-2.

Form P-0. Pemantauan Pelaksanaan DAK

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA..... BIDANG
PETA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK

Form P-1. Pemantauan Pelaksanaan DAK

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Triwulan :

No	BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam jutaan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam jutaan)	Volume	(Rp. Dalam jutaan)		(Rp. Dalam jutaan)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Catatan:

Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulan

1 = diisi Nomor Bidang

2 = diisi Nama Bidang

3 = diisi besaran masing-masing rincian kegiatan

4 = diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan

5 = diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik

6 = diisi besaran alokasi DAK Fisik per bidang

7 = diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola

8 = diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola

9 = diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual

10 = diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual

11 = diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap

12 = diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah

13 = diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase

14 = diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output

....., tanggal.....

Kepala Dinas.....

(.....)

15 = diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume output
 16 = diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan

Form P-2. Evaluasi Pemanfaatan DAK

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Kesesuaian pencapaian output hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK		Kesesuaian outcome hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK		Kesesuaian RK dengan DPA Daerah		Kesesuaian RK yang disetujui dengan pelaksanaannya		Kesesuaian RK yang disetujui dengan prioritas nasional		Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan		Kepatuhan dan ketertiban pelaporan		Keterangan
			Nilai	Alasan	Nilai	Alasan	Nilai	Alasan	Nilai	Alasan	Nilai	Alasan	Nilai	Alasan	Nilai	Alasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Catatan:

Data diisi secara lengkap sekali saja (Triwulan I) dengan mengacu pada paket sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan (RK)

1 = diisi nomor urut

2 = diisi nama paket/nama pekerjaan yang ditangani

3 = diisi nama kecamatan, kelurahan/desa lokasi proyek

4,6,8,10,12,14,16 = diisi nilai sesuai dengan Indikator Kesesuaian dalam Tabel 4.1

5,7,9,11,13,15,17 = diisi alasan berdasarkan Indikator Kesesuaian dalam Tabel 4.1

18 = diisi informasi yang perlu ditambahkan

....., tanggal.....

Kepala Dinas.....

(.....)

Tabel 4.1 Aspek Evaluasi Pemanfaatan DAK

No.	Ruang Lingkup	Kriteria	Indikator Kesesuaian	Bobot (%)
a.	Kesesuaian pencapaian output hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK	Capaian Output/Target Output (C/T)	<ul style="list-style-type: none"> - C/T < 80% : 0 - 80% ≤ C/T < 90% : 60 - 90% ≤ C/T < 100% : 80 - Capaian ≥ Target : 100 	15
b.	Kesesuaian outcome hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK	Capaian Outcome/Target Outcome (C/T)	<ul style="list-style-type: none"> - C/T < 80% : 0 - 80% ≤ C/T < 90% : 60 - 90% ≤ C/T < 100% : 80 - Capaian ≥ Target : 100 	15
c.	Kesesuaian RK dengan DPA Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> - Nama kegiatan (jenis penangan kegiatan) - Lokasi (Kab./Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa) - Target Output (volume kegiatan dalam DPA Daerah ≥ RK) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 kriteria tercantum dalam DPA Daerah : 60 - 2 kriteria tercantum dalam DPA Daerah : 80 - 3 kriteria tercantum dalam DPA Daerah : 100 	15
d.	Kesesuaian RK yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya (lokasi dan jenis penanganan kegiatan) (15%);	<p>Dokumen Kontrak/Kerangka Acuan Kerja Swakelola berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama kegiatan (jenis penangan kegiatan), - Lokasi (Kab./Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), - Target Output 	<ul style="list-style-type: none"> - Bila tidak ada Dokumen Kontrak/Kerangka Acuan Kerja Swakelola : 0 - Bila tidak ada salah satu kriteria yang tercantum dalam Dokumen Kontrak/Kerangka Acuan Kerja Swakelola : 0 - 1 kriteria tercantum dalam Dokumen Kontrak/Kerangka Acuan Kerja Swakelola : 60 - 2 kriteria tercantum dalam Dokumen Kontrak/Kerangka Acuan Kerja Swakelola : 80 - 3 kriteria tercantum dalam Dokumen Kontrak/Kerangka Acuan Kerja Swakelola: 100 	15
e.	Kesesuaian RK dengan prioritas nasional	Lokasi Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN (kesesuaian kab./kota, kecamatan/kelurahan)	<ul style="list-style-type: none"> - Bila lokasi tidak ada yang sesuai : 0 - Kab/Kota : 60 - Kecamatan : 80 - Kelurahan : 100 	15
f.	Kesesuaian hasil	PHO sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> - Bila tidak ada salah satu 	15

No.	Ruang Lingkup	Kriteria	Indikator Kesesuaian	Bobot (%)
	pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan (15%);	dokumen kontrak : - Lokasi - Volume Dokumentasi pelaksanaan 0%-50%-100%)	kriteria yang sesuai dengan PHO : 0 - 1 kriteria sesuai PHO : 60 - 2 kriteria sesuai PHO : 80 3 kriteria sesuai PHO: 100	
g.	Kepatuhan dan ketertiban pelaporan (10%).	- Pelaporan triwulan	- Tidak lapor atau 1 kali : 0 - Pelaporan 2 kali : 60 - Pelaporan 3 kali : 80 - Pelaporan 4 kali : 100	10

Nilai Total = [15% * Nilai (a) + 15% * Nilai (b) + 15% * Nilai (c) + 15% * Nilai (d) + 15% * Nilai (e)* + 15% * Nilai (f) + 10% * Nilai (g)]

Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai > 80 = Baik, Nilai 60-80 = Cukup, dan Nilai < 60 = Kurang Baik.

FORM PENINGKATAN KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

No	Nama Prasarana	Sasaran		Kondisi Awal Tahun (%)				Kondisi Akhir Tahun (%)				Ket.
		Kuant.	Sat.	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9

- Catatan :
- # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV
 - 1 = No. Urut
 - 2 = diisi nama paket kegiatan yang dibiayai DAK
 - 3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk bidang jalan, 4 Ha untuk bidang irigasi, atau 1000 jiwa terlayani untuk bidang air minum, sanitasi, dan perumahan
 - 5 - 8 = diisi kondisi prasarana pada akhir tahun (%)
 - 9 = keterangan

Lokasi, tanggal..... 20...

.....

(.....)

FORM DAMPAK DAN MANFAAT

Provinsi :
Kabupaten / Kota :

No	Nama Paket Pekerjaan	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Fisik dengan Spesifikasi Teknis (%)	Tingkat Pencapaian Tujuan/Sasaran (%)	Manfaat Ditanganinya Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Catatan :

- # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV
- 1 = No. Urut
- 2 = diisi nama paket pekerjaan
- 3 = diisi tingkat kesesuaian pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)
- 4 = diisi tingkat pencapaian tujuan/sasaran
- 5 = diisi manfaat ditanganinya program
- 6 = keterangan

Lokasi, tanggal.....20.....

.....

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

MENTERI PERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO